



Badan Ketahanan Pangan
Kementerian Pertanian

PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN

Indonesia 2018: Versi Rangkuman



Kemajuan Substansial dalam Pencapaian SDGs

Pemerintah dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla telah mengusung agenda pembangunan ketahanan pangan yang dituangkan dalam agenda ke-7 Nawa Cita dalam upaya mencapai kedaulatan pangan yang mencerminkan kekuatan dalam mengatur masalah pangan secara mandiri. Agenda ke-7 Nawa Cita kemudian diterjemahkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. RPJMN sebagai strategi kebijakan untuk menyediakan pangan bagi seluruh penduduk Indonesia yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau.

Agenda pembangunan nasional tersebut juga selaras dengan agenda pembangunan global paska 2015 yang tertuang dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). Tujuan ke-2 dari 17 tujuan yang ada di dalam SDGs menyebutkan komitmen masyarakat internasional untuk mengakhiri kelaparan, meraih keamanan pangan dan memperbaiki gizi, serta mempromosikan pertanian berkelanjutan.

Dibangun dari keberhasilan FIA 2005, FSVA 2009 dan 2015, maka pada tahun 2018 dilaksanakan pemutakhiran (*updating*) FSVA. FSVA 2018 memperluas cakupan analisis dengan memasukkan beberapa kabupaten baru yang terbentuk dalam beberapa tahun terakhir, sehingga kabupaten yang dianalisis sebanyak 416 kabupaten. Pada FSVA 2018 ini juga dilakukan analisis pada wilayah perkotaan yang pada FSVA sebelumnya tidak dianalisis, yaitu pada 98 kota di Indonesia. Sehingga total cakupan Kabupaten dan Kota yang dianalisis pada FSVA 2018 sebanyak 512 kabupaten/kota.

Dokumen ini merupakan alat yang baik untuk memotret ketahanan dan kerentanan pangan di tingkat wilayah yang dapat digambarkan secara lebih akurat dan bisa mencerminkan kondisi dan fakta terbaru sebagai hasil dari pembangunan serta mengakomodasi pemekaran wilayah. FSVA merupakan produk dari partisipasi aktif seluruh *stakeholder* terkait ketahanan di tingkat pusat dan Dinas/Kantor Ketahanan Pangan provinsi di bawah koordinasi Badan Ketahanan Pangan Pusat.

Tinjauan Umum Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan

Ketersediaan informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif, dan tertata dengan baik sangat penting untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kerawanan pangan dan gizi, karena dapat memberikan arah dan rekomendasi kepada pembuat keputusan dalam penyusunan program, kebijakan, serta pelaksanaan intervensi di tingkat pusat dan daerah. Penyediaan informasi diamanahkan dalam UU No 18/ 2012 tentang Pangan dan PP No 17/2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi.

Undang-Undang No. 18 tahun 2012 mendefinisikan Ketahanan Pangan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA*) merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisa data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan. Informasi dalam FSVA menjelaskan lokasi wilayah rentan terhadap kerawanan pangan dan indikator utama daerah tersebut rentan terhadap kerawanan pangan.

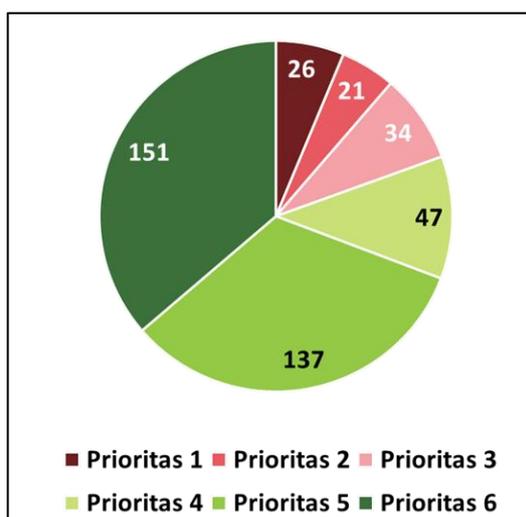
FSVA 2018 adalah pemutakhiran dari empat edisi sebelumnya. Pemutakhiran yang dilakukan meliputi metode analisis, indikator, dan data yang digunakan. Indikator yang digunakan dalam penyusunan FSVA merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator didasarkan pada: (i) keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan (ii) tingkat sensitifitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; dan (iii) ketersediaan data secara rutin untuk periode tertentu yang mencakup seluruh wilayah kabupaten/kota. Sembilan indikator digunakan dalam penyusunan FSVA. Indikator pada aspek ketersediaan pangan adalah rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan padi, jagung, ubi kayu, dan ubi jalar. Indikator pada akses pangan adalah persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran, dan persentase rumah tangga tanpa akses listrik. Indikator pada aspek pemanfaatan pangan adalah rata-rata lama sekolah perempuan diatas 15 tahun, persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih, rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk, persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (*stunting*), dan angka harapan hidup pada saat lahir.

Kabupaten/kota diklasifikasikan dalam 6 kelompok ketahanan pangan dan gizi berdasarkan pada tingkat keparahan dan penyebab dari situasi ketahanan pangan dan gizi. Kabupaten/kota di Prioritas 1, 2 dan 3 merupakan wilayah rentan pangan dengan klasifikasi Prioritas 1 tingkat rentan pangan tinggi, Prioritas 2 rentan pangan sedang, dan priroritas 3 rentan pangan rendah. Kabupaten/kota di Prioritas 4, 5, dan 6 merupakan wilayah tahan pangan dengan klasifikasi prioritas 4 tahan pangan rendah, prioritas 5 tahan pangan sedang, sedangkan prioritas 6 yaitu tahan pangan tinggi.

Metode analisis yang digunakan dalam penyusunan FSVA adalah metode pembobotan dengan menggunakan *expert judgement*. FSVA 2018 mengakomodasi perkembangan wilayah kabupaten/kota hasil pemekaran wilayah. Wilayah yang dianalisis dalam FSVA 2018 sebanyak 514 kabupaten/kota, terdiri dari 416 kabupaten dan 98 kota. Analisis komposit dibedakan antara wilayah kabupaten dan perkotaan. Khusus untuk analisis wilayah perkotaan hanya digunakan delapan (8) indikator dari aspek keterjangkauan dan pemanfaatan pangan, mengingat ketersediaan pangan di tingkat perkotaan tidak dipengaruhi oleh produksi yang berasal dari wilayah sendiri tetapi berasal dari perdagangan antar wilayah.

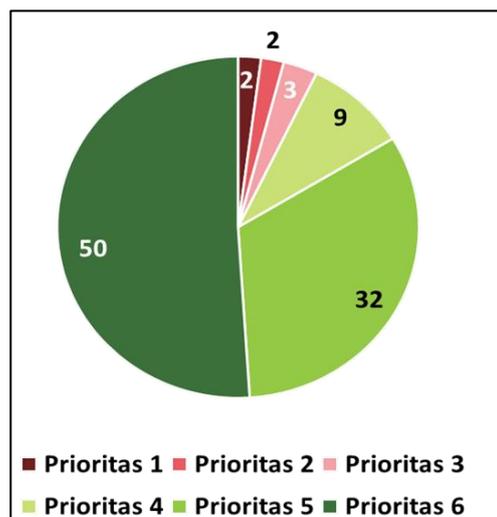
Situasi Ketahanan Pangan Indonesia 2018

Hasil analisis FSVA tahun 2018 menunjukkan bahwa kabupaten rentan pangan Prioritas 1-3 sebanyak 81 kabupaten dari 416 kabupaten (19%) yang terdiri dari 26 kabupaten (6%) Prioritas 1; 21 kabupaten (5%) Prioritas 2; dan 34 kabupaten (8%) Prioritas 3. Kabupaten prioritas 1 tersebar di 17 kabupaten di Provinsi Papua, 6 Kabupaten di Provinsi Papua Barat, 2 kabupaten di Provinsi Maluku, dan 1 kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Karakteristik kabupaten rentan pangan ditandai dengan rasio konsumsi terhadap ketersediaan pangan tinggi, persentase balita *stunting* tinggi, serta angka kemiskinan yang tinggi.



a. Kabupaten

Sementara itu, Kota Rentan Pangan Prioritas 1-3 sebanyak 7 Kota dari 98 kota di Indonesia (7,14%). Pada wilayah perkotaan, terdapat 2 kota (2%) Prioritas 1, yaitu Kota Subulussalam di Aceh dan Kota Tual di Maluku; 2 kota (2%) Prioritas 2, yaitu Kota Gunung Sitoli di Sumatera Utara dan Kota Pagar Alam di Sumatera Selatan; serta 3 kota (3%) Prioritas 3, yaitu Kota Tanjung Balai di Sumatera Utara, Lubuk Linggau di Sumatera Selatan, dan Tidore Kepulauan (Maluku Utara). Karakteristik kota rentan pangan ditandai dengan rumah tangga dengan pangsa pengeluaran pangan yang tinggi, akses air bersih yang rendah, dan balita *stunting* yang tinggi.



b. Kota

Gambar 1. Sebaran Jumlah Kabupaten dan Kota Berdasarkan Skala Prioritas

Karakteristik wilayah rentan rawan pangan adalah (1) Kabupaten-kabupaten daerah Indonesia Timur yang memiliki daerah prioritas 1-3 terbesar; (2) Kabupaten-kabupaten yang lokasinya jauh dari ibu kota provinsi/daerah perbatasan; (3) Kabupaten-kabupaten di Kepulauan; dan (4) Kabupaten pemekaran.

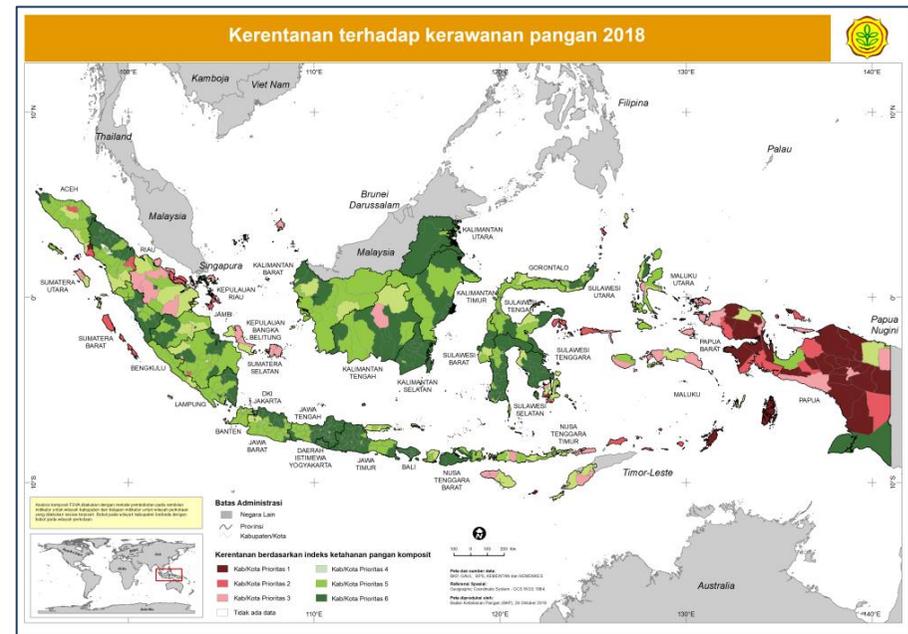
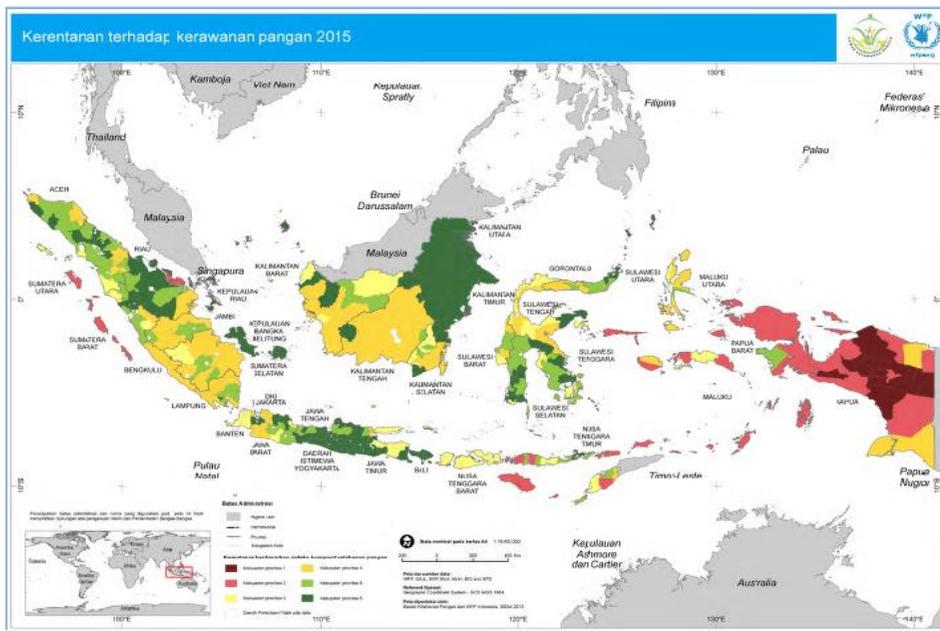
Perkembangan Situasi Ketahanan Pangan

Secara umum, ketahanan pangan sebagian besar masyarakat Indonesia telah meningkat pada periode 2015 – 2018. Hal ini, terutama sebagai dampak dari perbaikan pada beberapa indikator ketahanan pangan dan gizi. Program pembangunan pertanian selama empat tahun

telah berhasil meningkatkan status ketahanan pangan wilayah di 177 kabupaten:

1. **Kabupaten rentan pangan** yang naik peringkat sebanyak 75 kabupaten (19%) dengan rincian: Prioritas 2 ke Prioritas 3 sebanyak 18 kabupaten, Prioritas 2 ke Prioritas 4 sebanyak 5 kabupaten, Prioritas 2 ke Prioritas 5 sebanyak 2 kabupaten. Kabupaten Prioritas 3 yang meningkat ke Prioritas 4 sebanyak 14 kabupaten, Prioritas 3 ke Prioritas 5 sebanyak 23 kabupaten, dan Prioritas 3 ke Prioritas 6 sebanyak 13 kabupaten.
2. **Kabupaten tahan pangan** yang naik peringkat sebanyak 102 kabupaten (26%) dengan rincian: Prioritas 4 ke Prioritas 5 sebanyak 49 kabupaten, Prioritas 4 ke Prioritas 6 sebanyak 26 kabupaten, sedangkan Prioritas 5 ke Prioritas 6 sebanyak 27 kabupaten.

“Secara umum, ketahanan pangan sebagian besar masyarakat Indonesia telah meningkat pada periode 2015 – 2018. Hal ini, terutama sebagai dampak dari perbaikan pada beberapa indikator ketahanan pangan dan gizi. Program pembangunan pertanian selama empat tahun telah berhasil meningkatkan status ketahanan pangan wilayah di 177 kabupaten.”



Gambar 2. Perkembangan Situasi Ketahanan Pangan

Tantangan – Tantangan Utama

Tantangan Utama Wilayah Kabupaten

Kabupaten-kabupaten dalam kelompok rentan rawan pangan Prioritas 1-3 (81 kabupaten) diindikasikan oleh: i) Tingginya rasio konsumsi per kapita terhadap produksi bersih per kapita, ii) Tingginya prevalensi balita stunting, iii) Tingginya penduduk miskin, iv) Tingginya rumah tangga tanpa akses ke air bersih, dan v) Rendahnya rata-rata lama sekolah perempuan >15 tahun. Rata-rata rasio konsumsi terhadap produksi pangan di daerah rentan pangan Prioritas 1-3 adalah 3,92. Kabupaten-kabupaten tersebut sangat tergantung pada *supply* pangan dari wilayah lain yang merupakan daerah sentra untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya.

Rata-rata persentase balita *stunting* pada daerah rentan pangan adalah sebesar 33,72%. Namun demikian, angka tersebut tidak berbeda jauh dengan angka *stunting* di kabupaten tahan pangan, yaitu 32,21%. Melihat kondisi tersebut, maka penanganan *stunting* harus menjadi fokus tidak hanya di kabupaten rentan pangan tetapi juga di kabupaten yang tahan pangan.

Rata-rata angka kemiskinan di kabupaten rentan pangan adalah sebesar 23,19%. Angka

ini jauh di atas rata-rata angka kemiskinan nasional yang sebesar 10,64% (Susenas Maret 2017). Rata-rata rumah tangga tanpa akses bersih yang memadai pada kabupaten rentan pangan adalah 50,08%, sedangkan rata-rata angka lama sekolah perempuan >15 tahun di kabupaten rentan pangan hanya sebesar 6,95 tahun.

Tantangan Utama Wilayah Perkotaan

Kota-kota di Prioritas 1 – 3 diindikasikan oleh: i) Tingginya rumah tangga dengan pangsa pengeluaran pangan >65% terhadap total pengeluaran, ii) Tingginya rumah tangga tanpa akses ke air bersih, iii) Tingginya angka balita stunting, iv) Tingginya penduduk miskin, dan v) Rendahnya angka harapan hidup.

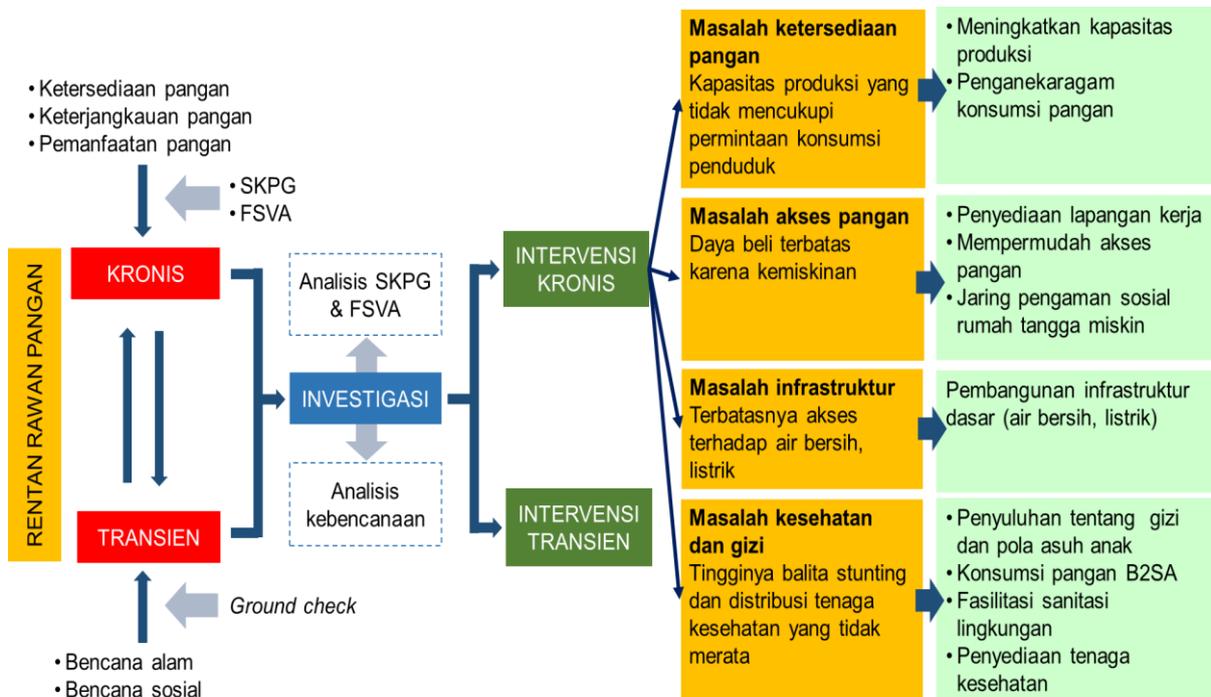
Kota-kota yang rentan rawan pangan dengan rata-rata pengeluaran pangan >65% masih tinggi, yaitu sebesar 56%. Selain itu, rata-rata 42,45% penduduknya memiliki akses yang terbatas terhadap infrastruktur dasar air bersih. Di kota-kota ini, rata-rata *stunting* pada balita sebesar 29%; rata-rata angka kemiskinan juga masih tinggi, yaitu sebesar 15%, serta rata-rata angka harapan hidup sebesar 66,29 tahun.

Rekomendasi Kebijakan

Penyebab terjadinya kondisi rentan rawan pangan di setiap wilayah tentu berbeda-beda, maka intervensi program untuk mencegah dan mengatasinya pun idealnya spesifik lokasi. Namun demikian, pendekatan penanganan kerentanan pangan secara umum dapat dibedakan antara wilayah kabupaten dan perkotaan.

Terdapat beberapa perbedaan karakteristik antara kabupaten dan kota diantaranya: i) Luas wilayah kabupaten relatif lebih luas; ii) Kepadatan penduduk kota lebih tinggi; iii) Mata pencaharian penduduk kabupaten pada

umumnya bergerak di sektor agraris, sedangkan penduduk kota di perdagangan dan jasa; iv) Tingkat pendidikan dan kesehatan penduduk kota relatif lebih baik; dan v) Rata-rata Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di kabupaten relatif lebih rendah dibandingkan kota, hal ini berimplikasi pada pendapatan asli daerah PAD. Perbedaan tersebut dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan penanganan kerentanan pangan, dengan tetap memperhatikan kesamaan faktor yang menjadi penyebab kerentanan pangan di wilayah masing-masing.



Gambar 3. Upaya Penanganan Kerentanan Pangan

Rekomendasi untuk Wilayah Kabupaten

Fokus lokasi penanganan kerentanan pangan di wilayah kabupaten diprioritaskan pada:

- Kabupaten-kabupaten yang terletak di Kawasan Indonesia Timur yang memiliki daerah prioritas 1-3 terbesar
- Kabupaten-kabupaten yang lokasinya jauh dari ibu kota provinsi atau di wilayah yang

- berbatasan dengan provinsi/negara lain yang memiliki tingkat ketahanan pangan lebih rendah dibandingkan kabupaten lain.
- Kabupaten-kabupaten di Kepulauan yang menghadapi kendala akses fisik terhadap sumber pangan.

d. Kabupaten-kabupaten pemekaran yang fasilitas, infrastruktur dan kapasitas SDMnya masih terbatas.

Program-program peningkatan ketahanan pangan dan penanganan kerentanan pangan wilayah kabupaten diarahkan pada kegiatan:

- a. Peningkatan penyediaan pangan di daerah non sentra produksi dengan mengoptimalkan sumberdaya pangan lokal.
- b. Penanganan stunting diantaranya melalui sosialisasi dan penyuluhan tentang gizi dan pola asuh anak; penyediaan fasilitas dan layanan air bersih.
- c. Penanganan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja, padat karya, redistribusi lahan; pembangunan

infrastruktur dasar (jalan, listrik, rumah sakit), dan pemberian bantuan sosial; serta pembangunan usaha produktif/UMKM/padat karya untuk menggerakkan ekonomi wilayah.

- d. Peningkatan akses air bersih melalui penyediaan fasilitas dan layanan air bersih; sosialisasi dan penyuluhan.
- e. Penurunan pangsa pengeluaran pangan melalui sosialisasi pola konsumsi pangan (B2SA) serta peningkatan kesempatan kerja.
- f. Peningkatan pendapatan
- g. Peningkatan pendidikan perempuan.
- h. Penyediaan tenaga kesehatan.



Gambar 4. Kerangka Intervensi untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan Kabupaten

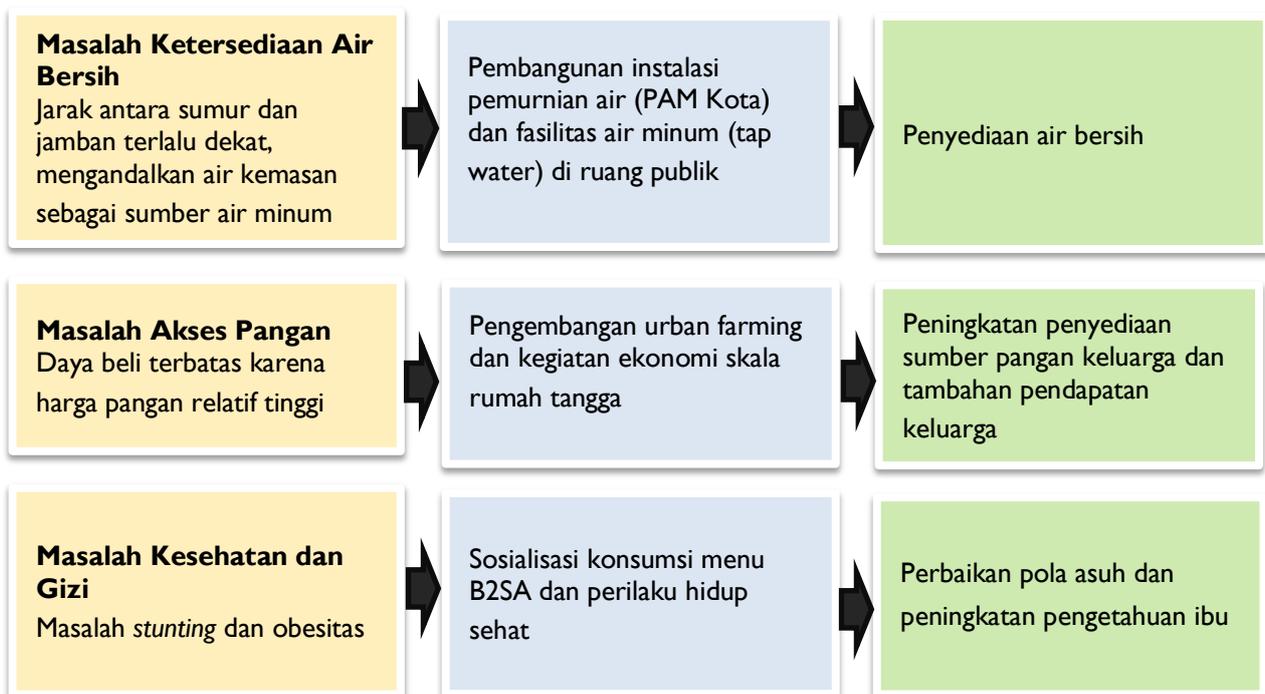
Rekomendasi untuk Wilayah Perkotaan

Fokus lokasi penanganan kerentanan pangan di wilayah perkotaan diprioritaskan pada:

- Kota-kota yang memiliki keterbatasan akses terhadap pangan terutama dalam hal stabilisasi pasokan dan daya beli masyarakat.
- Kota-kota yang memiliki keterbatasan dalam pemanfaatan pangan dikarenakan oleh pemahaman/pengetahuan yang terbatas ataupun karena buruknya sanitasi.

Program-program penanganan kerentanan pangan di daerah perkotaan diarahkan pada kegiatan:

- Peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat untuk meningkatkan daya beli masyarakat.
- Sosialisasi pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman.
- Peningkatan akses rumah tangga terhadap air bersih melalui penyediaan fasilitas dan layanan air bersih.
- Peningkatan sanitasi lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat melalui sosialisasi dan penyuluhan.
- Penanganan balita stunting melalui intervensi program gizi baik yang bersifat spesifik maupun sensitif.



Gambar 4. Kerangka Intervensi untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan Perkotaan

Kerjasama Lintas Program dan Sektor

Menurunkan tingkat kerentanan pangan dan gizi merupakan tantangan yang besar bagi pihak perencana dan pengambil kebijakan karena masalah kerentanan pangan dan gizi merupakan permasalahan multi-efek, tidak hanya masalah satu sektor, tetapi meliputi

aspek dari hulu hingga hilir. Demikian pula dengan dukungan berbagai program pembangunan ketahanan pangan dan gizi dari pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah, swasta dan seluruh komponen masyarakat perlu disinergikan sehingga ketahanan pangan secara berkelanjutan dapat terwujud.

Kerjasama lintas program merupakan keterpaduan beberapa program yang dilakukan pada satu wilayah administrasi (desa). Kerjasama lintas program dapat meningkatkan efisiensi anggaran dan tenaga kerja serta mempercepat pencapaian tujuan akhir yang ingin dicapai.

Kerjasama lintas sektor diartikan sebagai usaha bersama beberapa pihak seperti Kementerian/Dinas bahkan perguruan tinggi dan masyarakat yang dilandasi oleh pemahaman yang sama bahwa ketahanan pangan dan gizi bersifat multi dimensi. Untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi

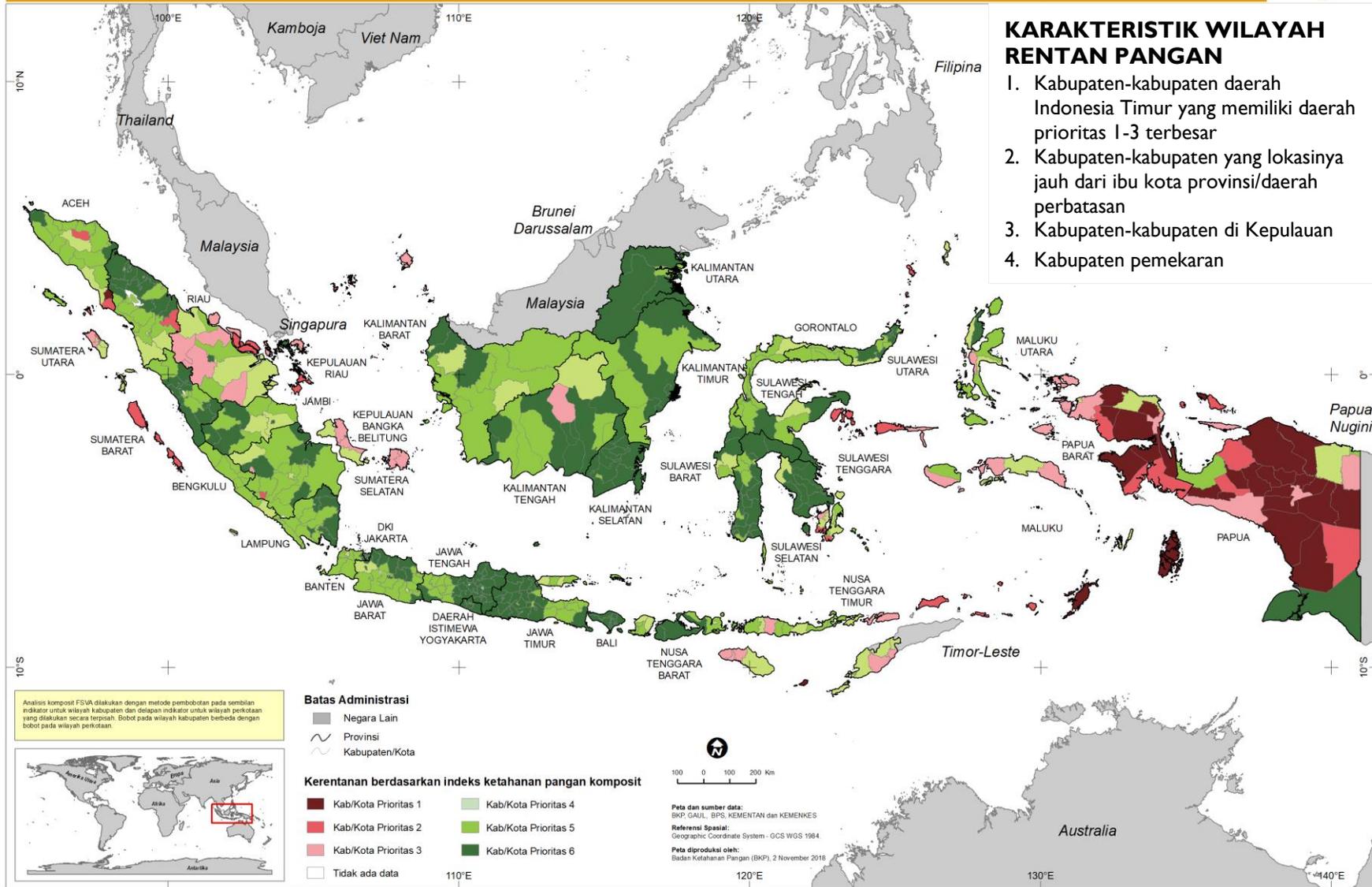
mensyaratkan kerjasama tersebut, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Komitmen menjadi kata kunci keberhasilan kerjasama lintas sektor.

Forum Dewan Ketahanan Pangan (DKP) harus dioptimalkan untuk akselerasi program yang melibatkan lintas sektor. Berdasarkan Perpres 83/2006, DKP diberikan tugas untuk memberikan masukan, terutama hal-hal yang bersifat strategis kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan tingkatannya masing-masing untuk membangun ketahanan pangan dan gizi.

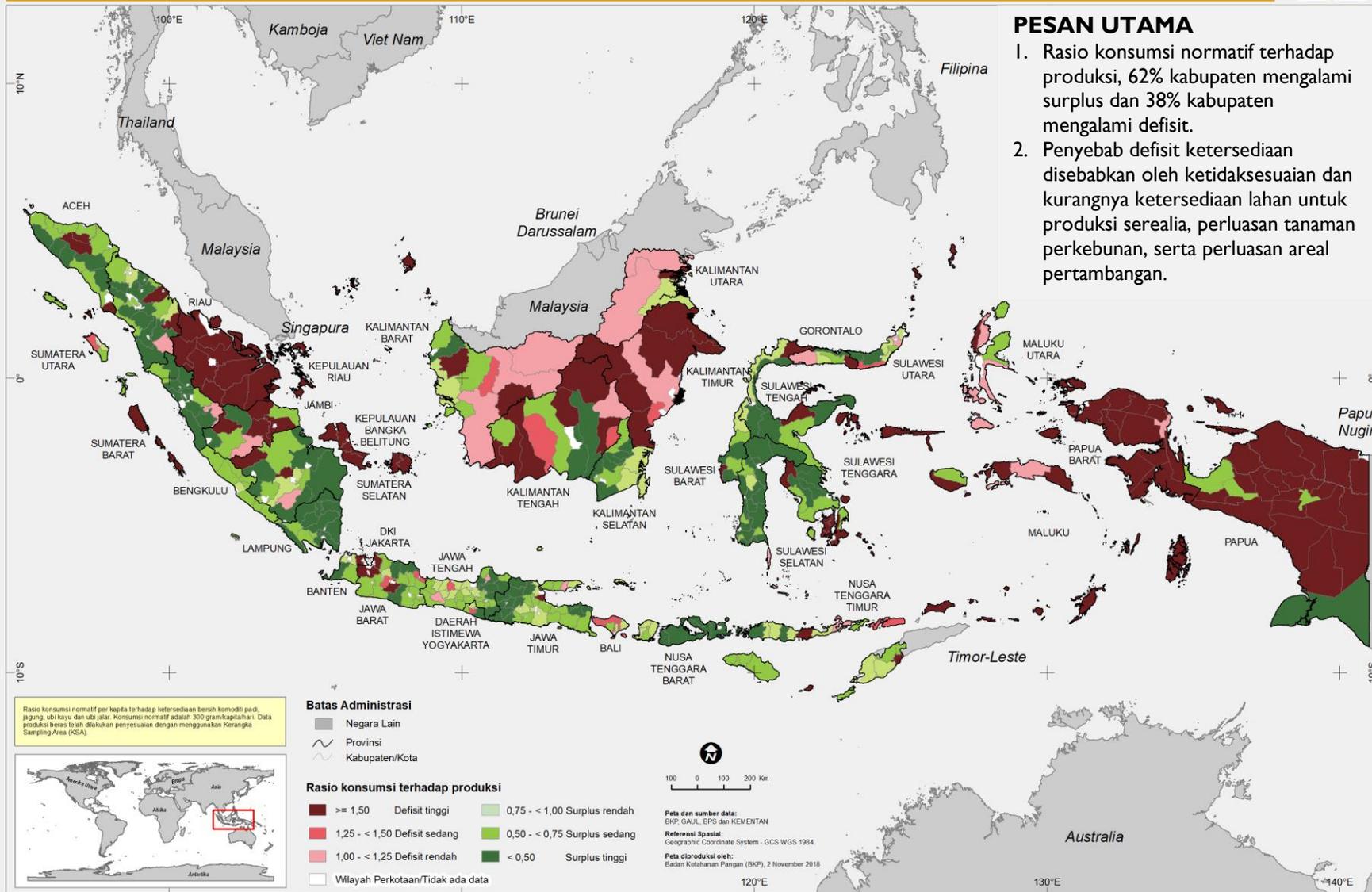


Gambar 5. Koordinasi Lintas Sektor dalam Penanganan Kerentanan Pangan

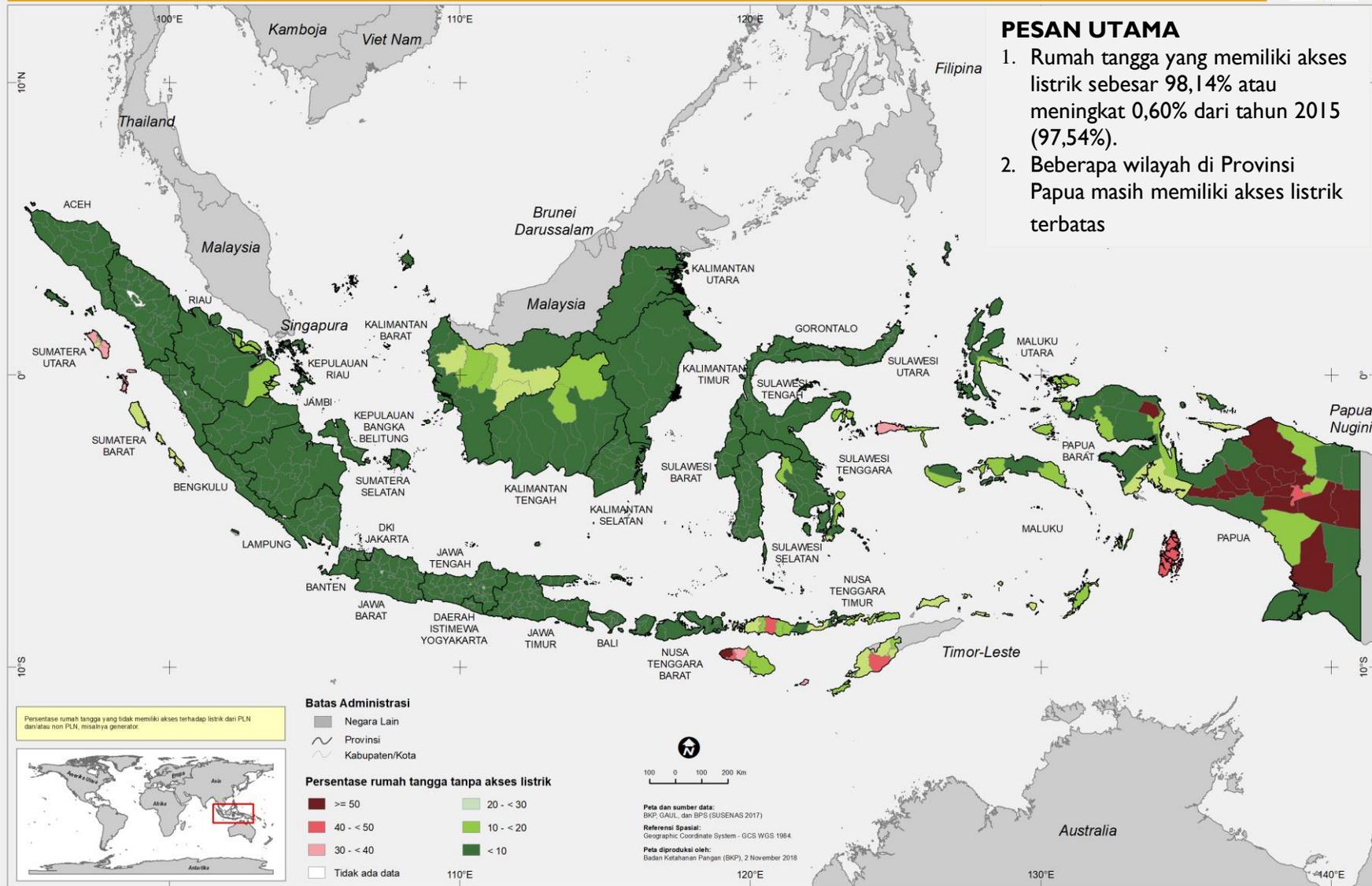
Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 2018



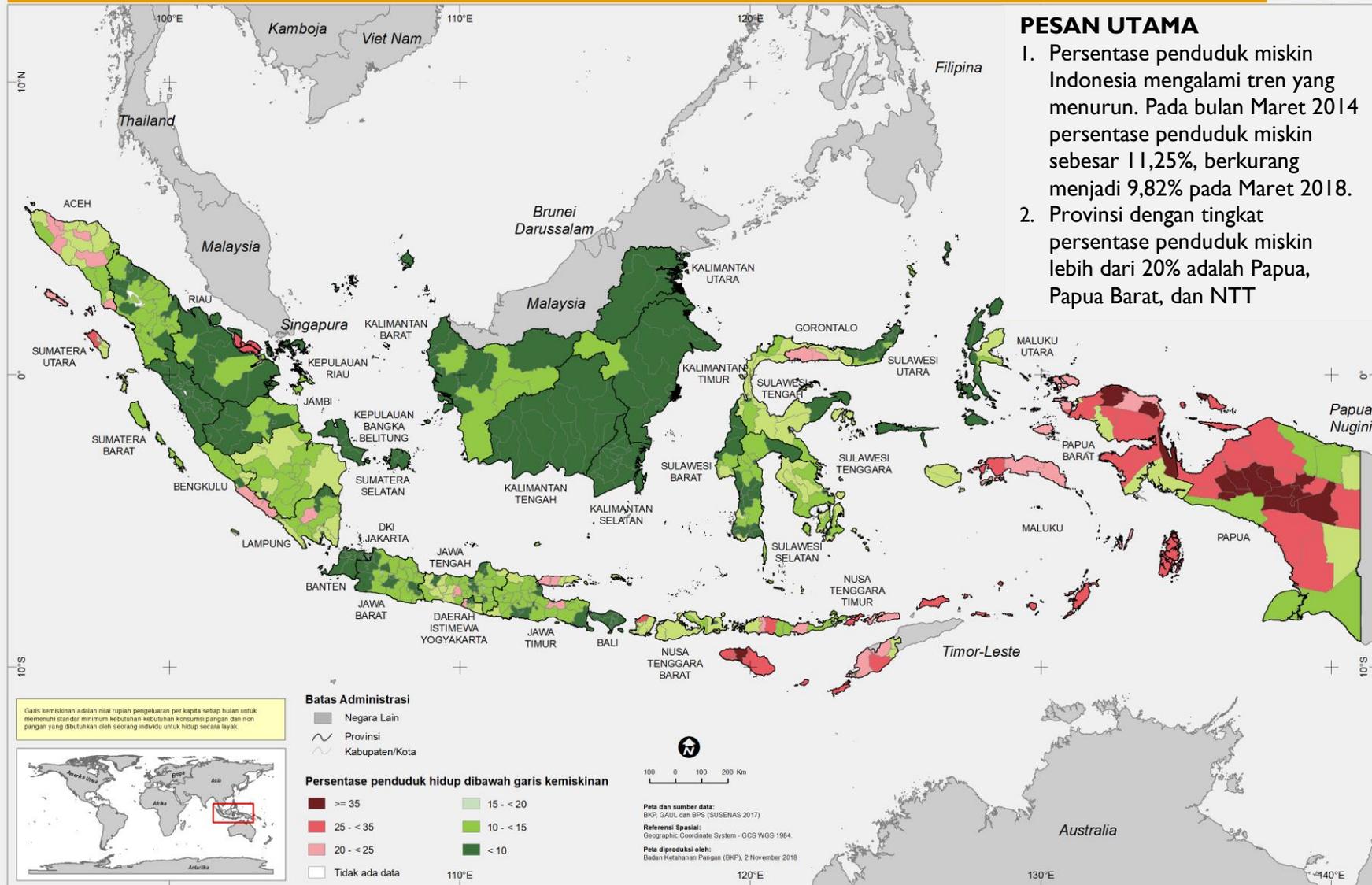
Peta Rasio Konsumsi Normatif Per kapita Terhadap Produksi Bersih Serealia



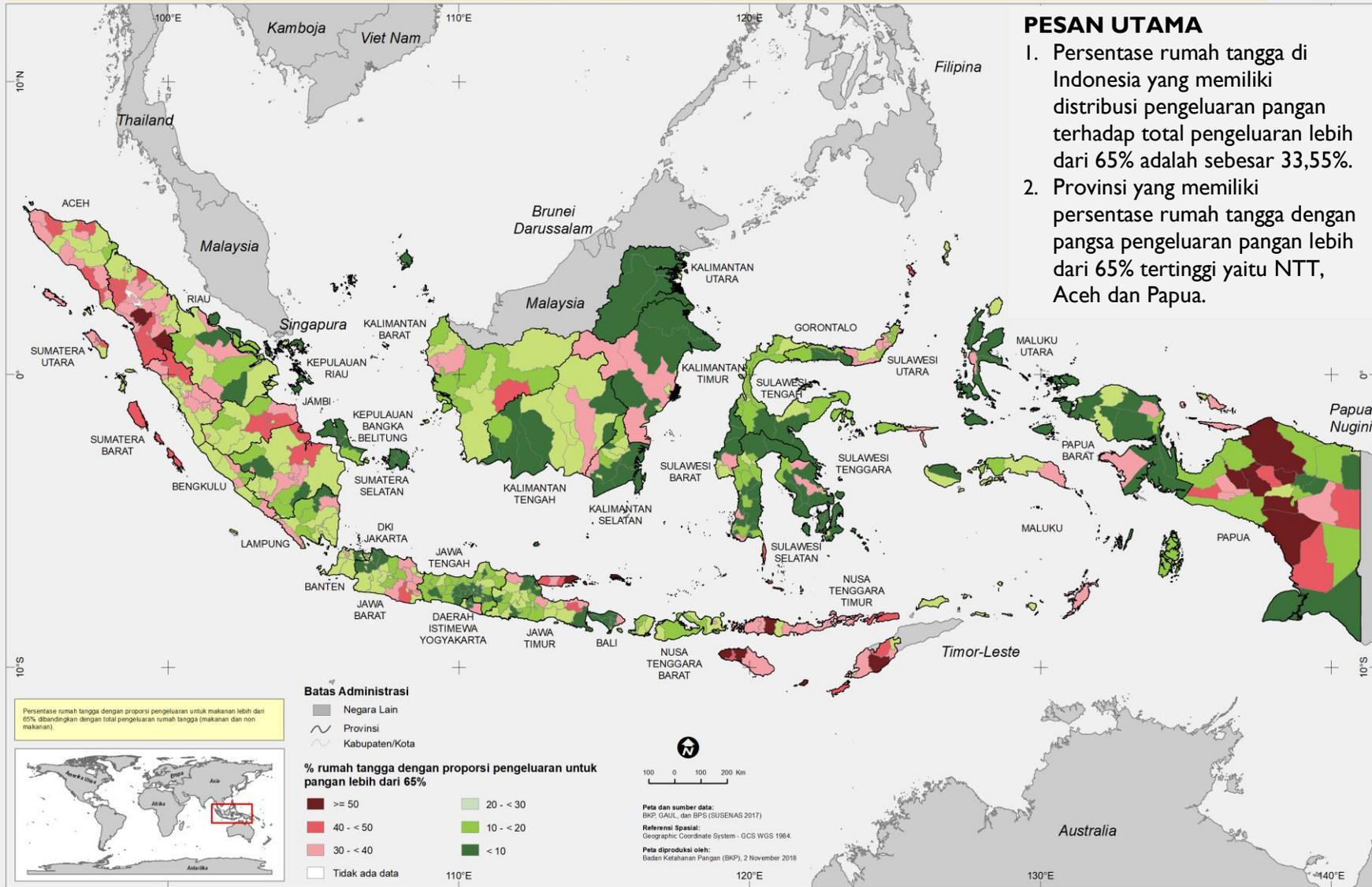
Peta Rumah Tangga Tanpa Akses Terhadap Listrik



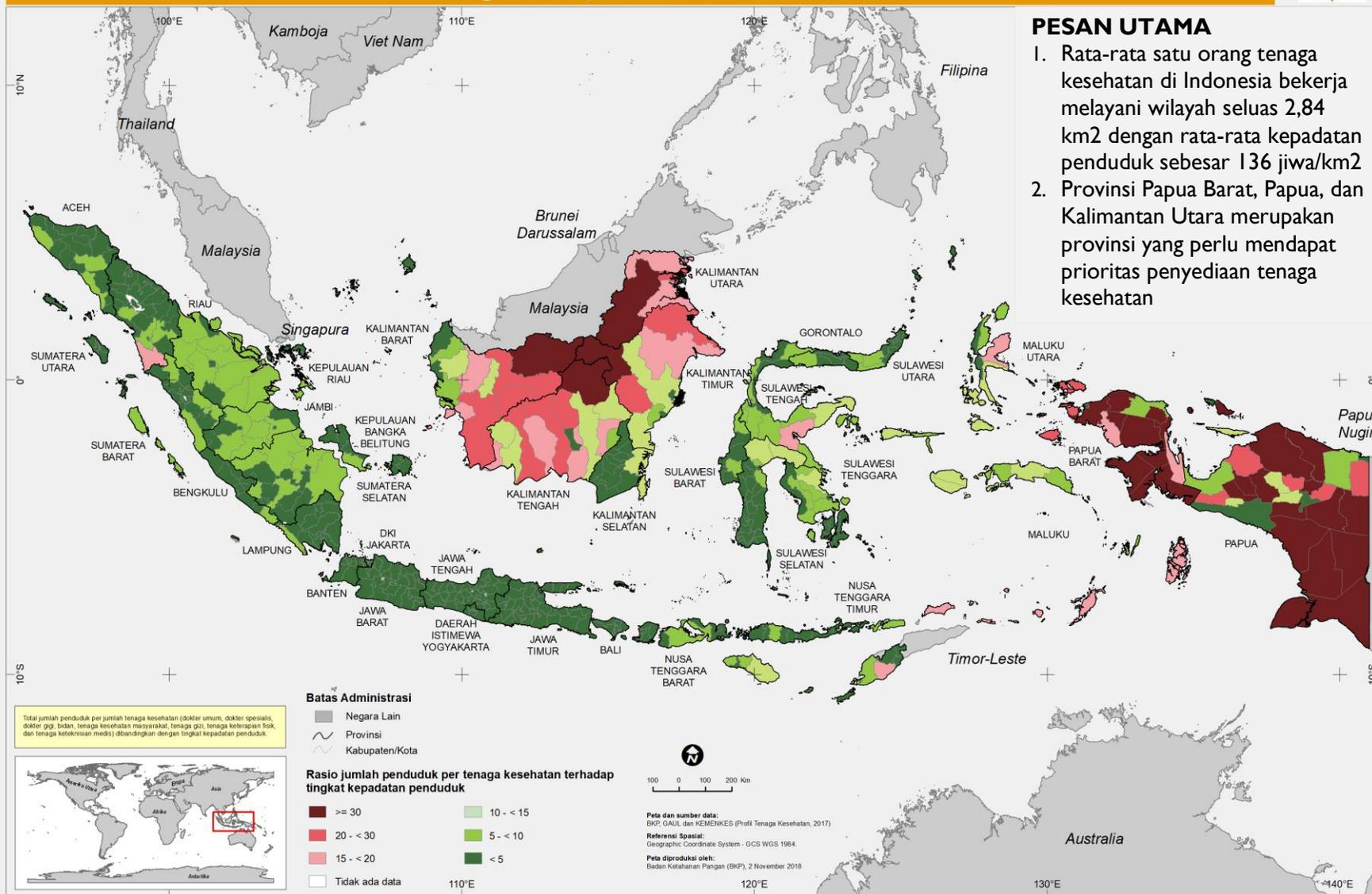
Peta Penduduk Hidup Di Bawah Garis Kemiskinan



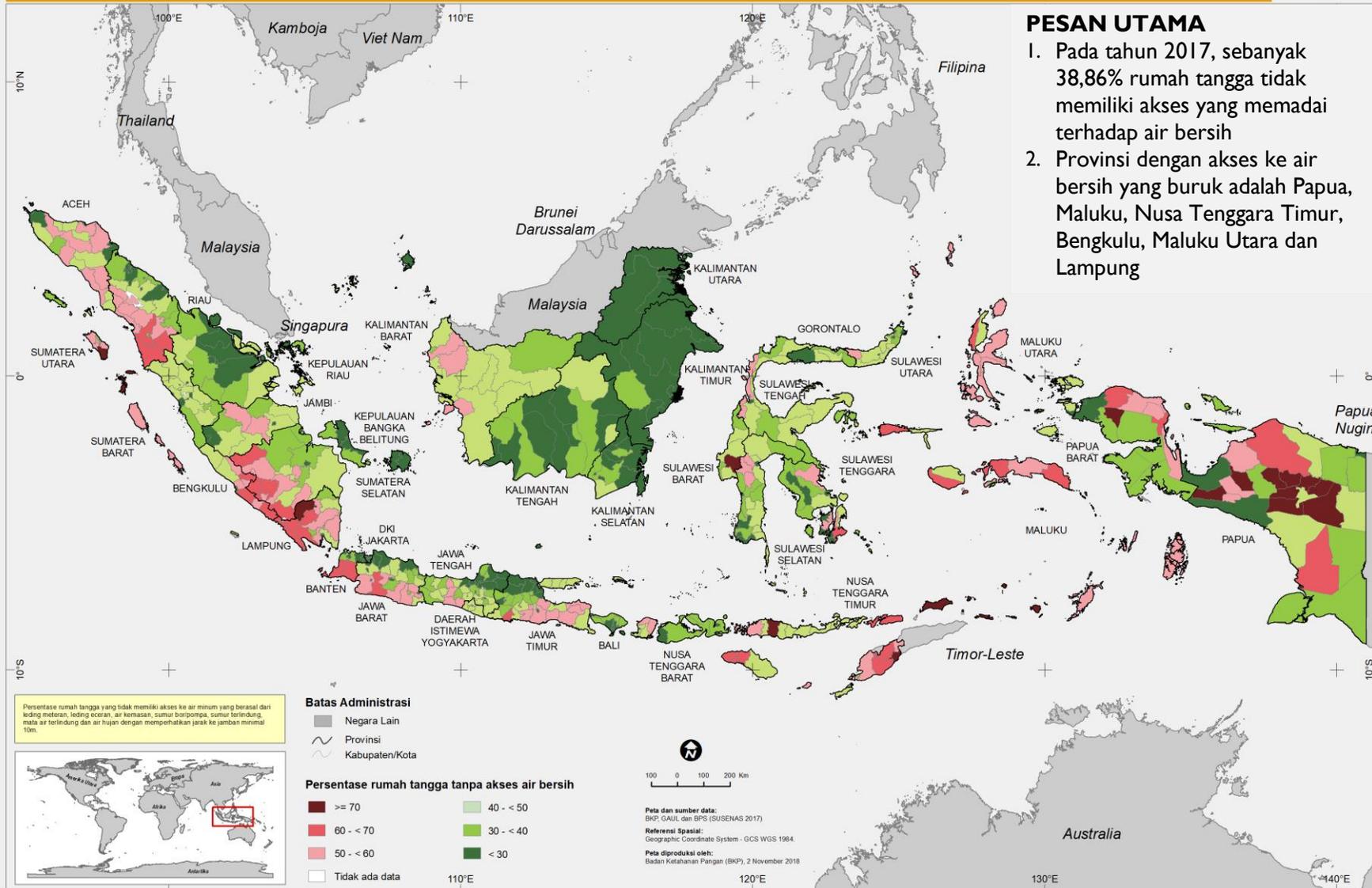
Peta Rumah Tangga dengan Proporsi Pengeluaran untuk Pangan Lebih Dari 65% Terhadap Total Pengeluaran



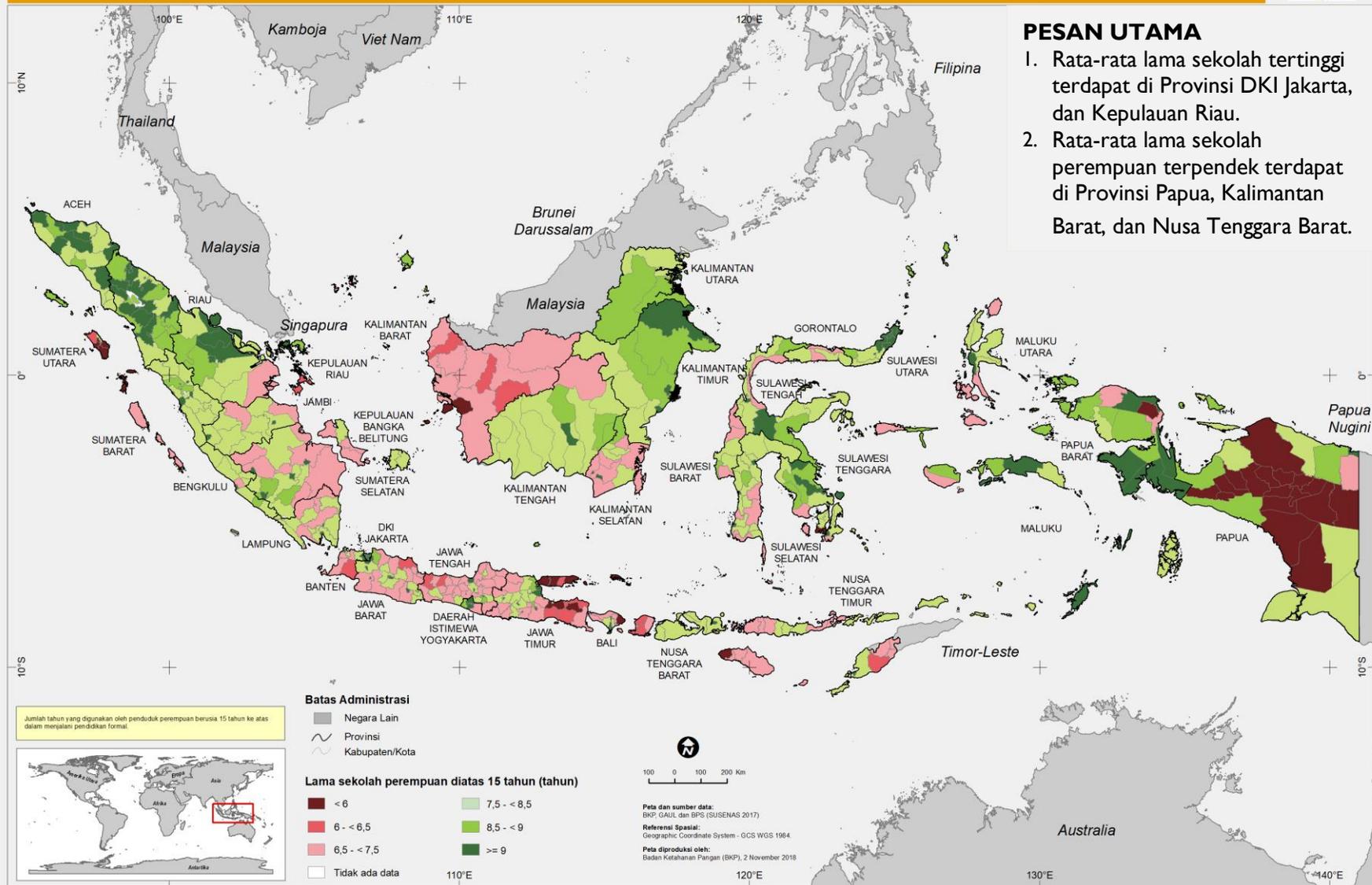
Peta Rasio Jumlah Penduduk Per Tenaga Kesehatan Terhadap Tingkat Kepadatan Penduduk



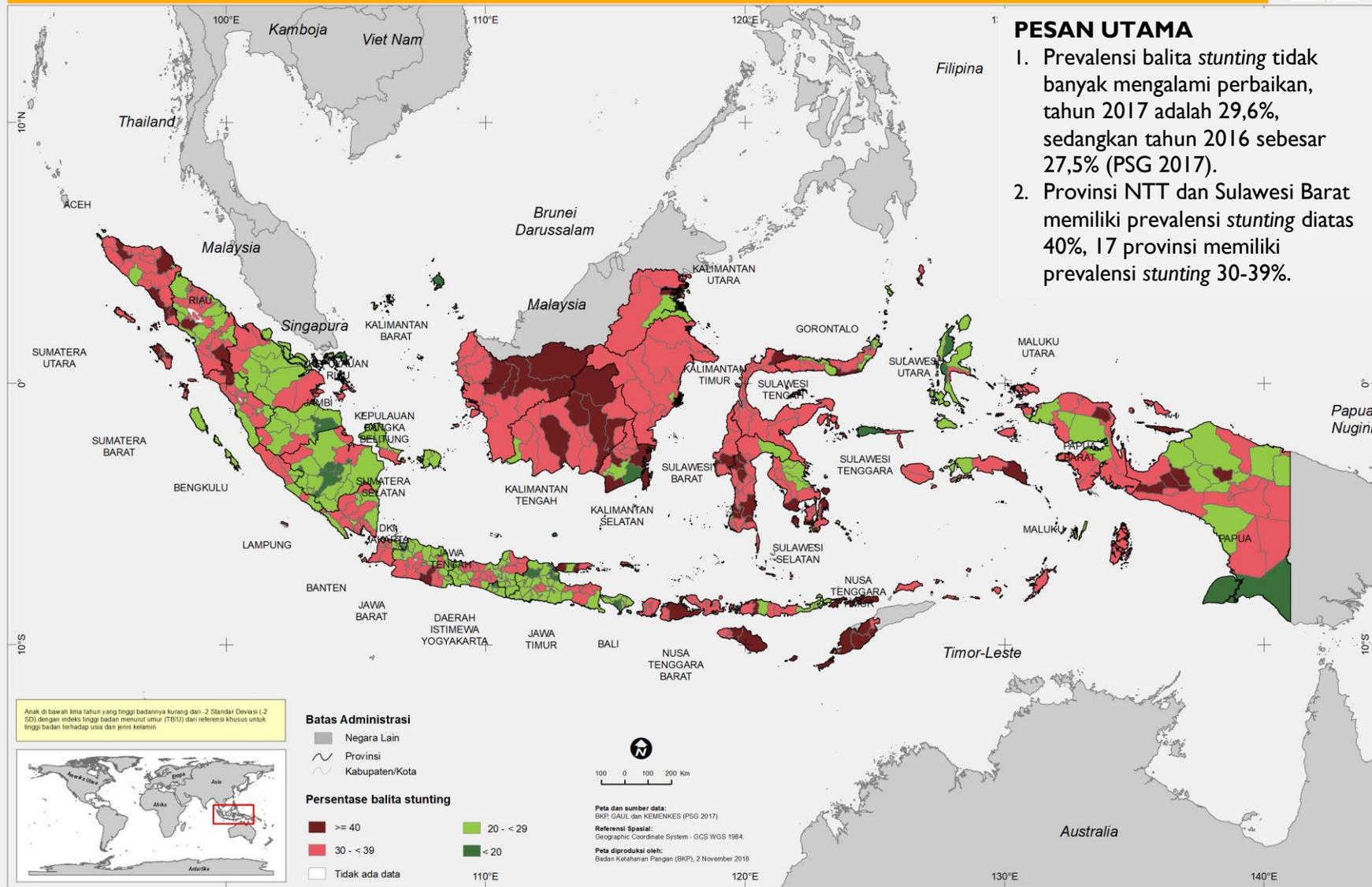
Peta Persentase Rumah Tangga Tanpa Akses Ke Air Bersih



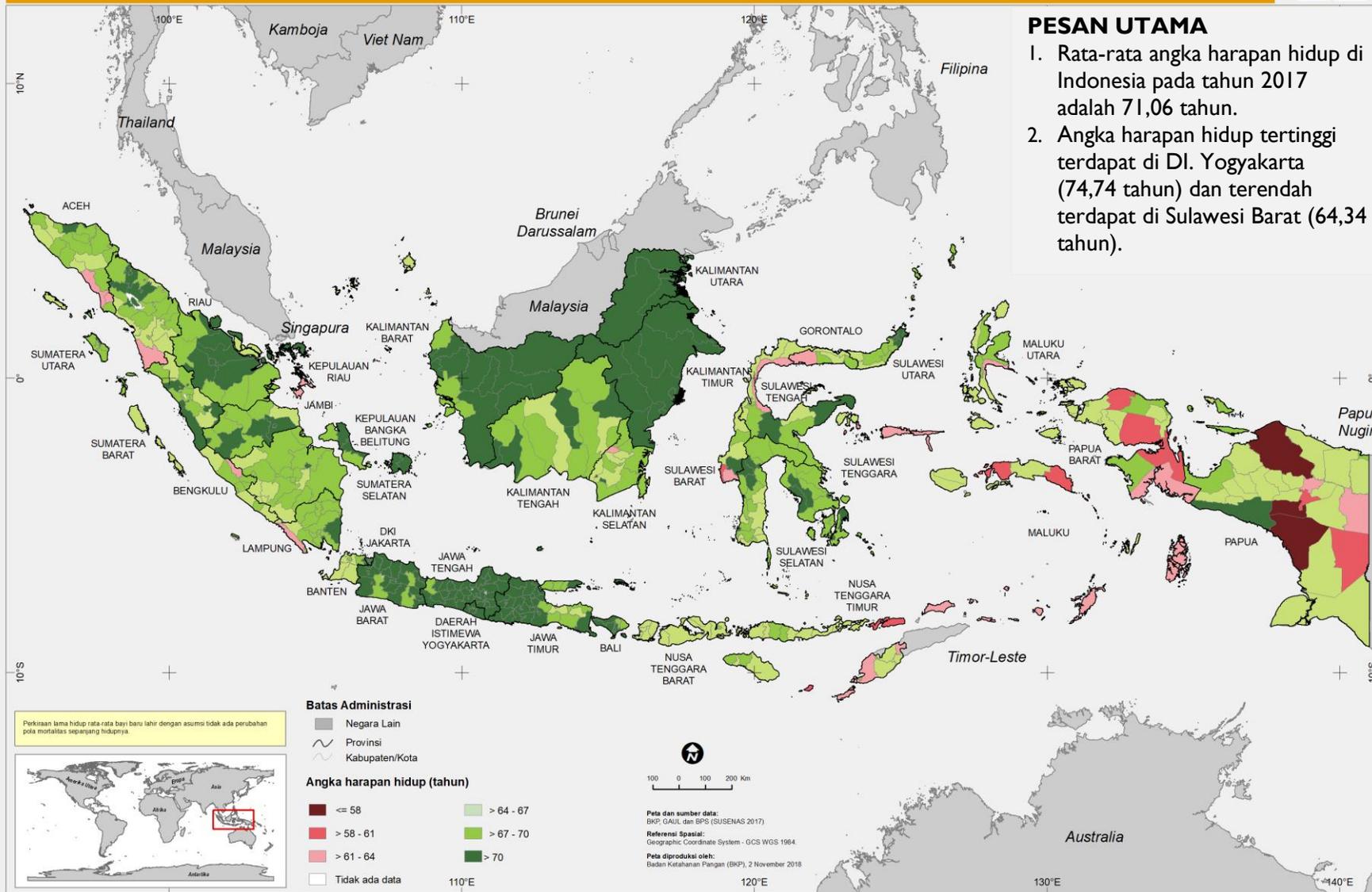
Peta Rata-rata Lama Sekolah Perempuan Diatas 15 Tahun



Peta Persentase Balita dengan Tinggi Badan Di Bawah Standar (Stunting)



Peta Angka Harapan Hidup





Badan Ketahanan Pangan

Kementerian Pertanian

Jl. Harsono RM No. 3, Ragunan

Jakarta 12550 INDONESIA

Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Telp : (62) 21 – 7816652, 78840424

Fax : (62) 21 – 7816652, 78840424

[http : bkp.pertanian.go.id](http://bkp.pertanian.go.id)